

**IDENTIFIKASI PENGARUH FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN
PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

TESIS



**HARRI ROBERT
NPM : 1910018312079**

**PROGRAM STUDI MAGISTER TEKNIK SIPIL
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2024

**IDENTIFIKASI PENGARUH FAKTOR PENGHAMBAT
PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

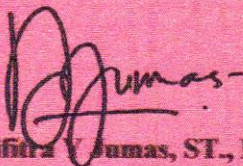
**HARRI ROBERT
NPM : 1910018312079**


**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Tanggal 8 Maret 2024**

Mengetahui :

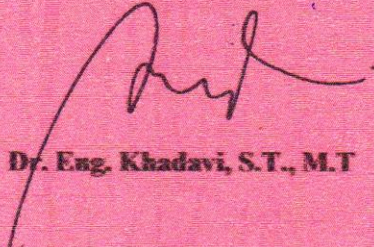
Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Dwifitra Y. Jumas, ST., MSCE


Dr. Rini Mulyani, ST., MT

**Program Studi Magister Teknik Sipil
Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan
Universitas Bung Hatta**


Dr. Eng. Khadavi, S.T., M.T

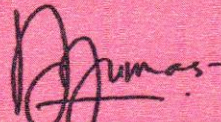
**IDENTIFIKASI PENGARUH FAKTOR PENGHAMBAT
PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA
TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**HARRI ROBERT
NPM. 1910018312079**

**Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Tanggal 8 Maret 2024**

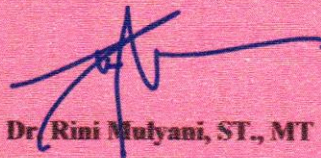
Tim Penguji :

Ketua,



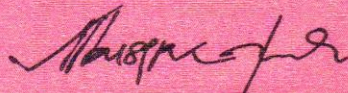
Dr. Dwifura Y. Jumas, ST., MSCE

Sekretaris,



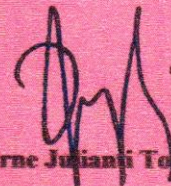
Dr. Rini Mulyani, ST., MT

Anggota,



Dr. Al Busyra Fuadi, ST., M.Sc

Anggota,



Dr. Harne Juliani Toa, ST., M.Sc

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Teknik pada tanggal 8 Maret 2024

Plt. Dekan,




Dr. Al Busyra Fuadi, S.T., M.Sc

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HARRI ROBERT
NPM : 1910018312079
Program Studi : Magister Teknik Sipil

Menyatakan sesungguhnya bahwa tesis dengan judul : **“Identifikasi Pengaruh Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Padang Pariaman”** yang dibuat untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Magister Teknik pada Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan Universitas Bung Hatta. Sejauh ini yang saya ketahui bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari tesis yang telah dipublikasikan sebelumnya dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Magister Teknik dalam lingkungan Universitas Bung Hatta maupun di Perguruan Tinggi atau Instansi manapun, kecuali bagian sumber informasinya dicantumkan sebagaimana mestinya.

Apabila dikemudian hari tidak sesuai dengan pernyataan diatas, maka penulis bersedia menerima sanksi yang akan dikenakan.

Padang, 10 Maret 2024
Saya yang menyatakan,



HARRI ROBERT
1910018312079

IDENTIFIKASI PENGARUH FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK

Penyusunan RTRW diamanatkan oleh Undang - Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dibutuhkan proses dan prosedur penyusunan yang baik agar dihasilkan dokumen rencana tata ruang yang secara substansial telah menyelesaikan isu pembangunan daerah, efektif sebagai instrumen pengarah dan pengendalian pembangunan dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengendalian pembangunan daerah. Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dimana dalam jangka waktu 5 tahun bisa direvisi untuk mengakomodasi dan menyesuaikan dengan perkembangan daerah dan dinamika pembangunan yang terjadi selama kurun waktu tersebut. Namun beberapa data ditemukan pelaksanaannya mengalami keterlambatan hampir mendekati 2 (dua) bulan lebih lambat dari *time schedule* yang sudah direncanakan di dalam KAK. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, data yang diperoleh dari *sample* populasi penelitian dianalisis sesuai dengan metode statistik yang digunakan kemudian diinterpretasikan. Populasi dari penelitian ini terdiri dari PPK, PPTK, tim teknis dan konsultan perencana. Hasil dari penelitian, terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab keterlambatan pekerjaan, yaitu Faktor peralatan, faktor manajerial, Faktor Perencanaan dan Penjadwalan (*planning and scheduling*), Faktor Kontrol dan Evaluasi Pekerjaan, Faktor Lingkup Pekerjaan, Faktor Tenaga Ahli.

Kata kunci : Faktor penghambat, Dokumen RTRW

IDENTIFICATION OF THE INFLUENCE OF FACTORS INHIBITING IMPLEMENTATION PREPARATION OF REGIONAL SPATIAL PLAN DOCUMENTS PADANG PARIAMAN DISTRICT

ABSTRACT

The preparation of RTRW is mandated by the Spatial Planning Law Number 26 of 2007 which requires good preparation processes and procedures to produce a spatial planning document that substantially resolves regional development issues, is effective as an instrument for directing and controlling development and has a strong legal basis for control. regional development. The revision of the RTRW for Padang Pariaman Regency for 2010-2030 was carried out in accordance with the provisions of the Spatial Planning Law Number 26 of 2007 where within a period of 5 years it could be revised to accommodate and adapt to regional developments and development dynamics that occurred during that period. However, some data found that the implementation was delayed, almost 2 (two) months later than *time schedule* which has been planned in the KAK. The aim of this research is to identify the factors that cause delays in completing the preparation of the RTRW documents for Padang Pariaman Regency. This research is quantitative descriptive research, data obtained from *sample* The research population is analyzed according to the statistical methods used and then interpreted. The population of this research consisted of PPK, PPTK, technical team and planning consultants. The results of the research show that there are several factors that cause work delays, namely equipment factors, managerial factors, planning and scheduling factors, work control and evaluation factors, work scope factors, expert staff factors.

Keywords: Inhibiting factors, RTRW Document

KATA PENGANTAR

Puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul :

IDENTIFIKASI PENGARUH FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Teknik pada Program Studi Pasca Sarjana Teknik Sipil Universitas Bung Hatta. Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr.Eng. Khadavi, S.T., M.T selaku Ketua Progam Studi Magister Teknik Sipil Universitas Bung Hatta
2. Ibu Dr. Dwifitra Y Jumas, S.T., MSCE dan Ibu Dr. Rini Mulyani, S.T, M.Sc (Eng) selaku dosen Pembimbing.
3. Bapak Dr. Al Busyra Fuadi, S.T, M.Sc dan Ibu Dr. Harne Julianti Tou, S.T, M.Sc selaku Dosen Penguji

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, 10 Maret 2024

HARRI ROBERT
1910018312079

DAFTAR ISI

Kata Pengantar -----	i
Daftar Isi -----	ii
Daftar Tabel -----	iv
Daftar Gambar-----	v
BAB 1 PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang Masalah -----	1
1.2 Rumusan Masalah -----	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian-----	4
1.3.1 Tujuan Penelitian -----	4
1.3.2 Manfaat Penelitian-----	5
1.4 Batasan Penelitian -----	5
BAB 2 LANDASAN TEORI -----	7
2.1 Pengertian Penyedia Jasa -----	7
2.2 Manajemen Proyek -----	7
2.3 Penyusunan RTRW-----	8
2.3.1 Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RTRW -----	8
2.3.2 Ukuran Produktivitas Pelaksanaan Proyek -----	9
2.4 Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan -----	13
2.5 Jenis-Jenis Keterlambatan -----	14
2.6 Faktor Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Proyek -----	16
2.7 SPSS (Statistical Product and Service Solutions) -----	18
BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN-----	20
3.1 Jenis Penelitian -----	20
3.2 Subjek dan Objek Penelitian -----	21
3.2.1 Subjek Penelitian -----	22
3.2.2 Objek Penelitian -----	22
3.3 Data dan Cara Pengumpulan Data -----	22
3.4 Pengumpulan Data-----	23
3.5 Analisis Data -----	23
BAB 4 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA-----	27
4.1 Pelaksanaan Penelitian -----	27
4.2 Hasil Penelitian-----	27
4.2.1 Profil Responden-----	28
4.2.2 Uji Validitas dan Reliabilitas-----	28
4.3 Analisis dan Pembahasan -----	30
4.3.1 Analisis Deskriptif-----	30
4.3.2 Analisis Ranking-----	31
4.3.3 Pembahasan-----	31

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN -----	35
5.1 Kesimpulan -----	35
5.2 Saran -----	36
DAFTAR PUSTAKA -----	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penyebab Keterlambatan Penyelesaian Penyusunan Dokumen RTRW -----	16
Tabel 3.1 Para Pihak yang Terkait Pekerjaan Penyusunan RTRW -----	21
Tabel 3.2 Skoring Skala Likert -----	25
Tabel 4.1 Profil Responden2 -----	8
Tabel 4.2 Nilai Alpha Cronbach -----	29
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas -----	29
Tabel 4.4 Hasil Uji Reliabilitas -----	30
Tabel 4.5 Analisis Ranking Variabel -----	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian-----	26
--------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan matra spasial dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam RTRW Kabupaten direncanakan dan diarahkan berbagai sektor pembangunan yang memiliki aspek spasial untuk menjamin terwujudnya pembangunan wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penyusunan RTRW diamanatkan oleh Undang - Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007. Dalam rangka penyusunan RTRW tersebut dibutuhkan proses dan prosedur penyusunan yang baik agar dihasilkan dokumen rencana tata ruang yang secara substansial telah menyelesaikan isu pembangunan daerah, efektif sebagai instrumen pengarah dan pengendalian pembangunan dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk pengendalian pembangunan daerah. Dalam proses penyusunannya, RTRW Kabupaten merupakan hasil kajian teknis dari unsur-unsur wilayah dan juga hasil kesepakatan berbagai stakeholders sebagai pedoman pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di daerah.

Fungsi RTRW kabupaten adalah sebagai:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kabupaten;
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten;
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten;
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kabupaten yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta penerapan sanksi; dan
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2010-2030 dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 dimana dalam jangka waktu 5 tahun bisa direvisi untuk mengakomodasi dan menyesuaikan dengan perkembangan daerah dan dinamika pembangunan yang terjadi selama kurun waktu tersebut.

Dengan perkembangan daerah Kabupaten Padang Pariaman yang dinamis tersebut diatas maka dibutuhkan arahan RTRW Kabupaten yang dapat mengkoordinasikan dan menjadi panduan dalam perencanaan dalam jangka panjang. RTRW Kabupaten Padang Pariaman 2010-2030 terlihat belum seluruhnya mengakomodasi perkembangan pembangunan yang terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan revisi RTRW Kabupaten untuk menampung dinamika pembangunan daerah. Maka disusunlah Revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017

Setiap proyek mempunyai rencana pelaksanaan yang tertentu, kapan pelaksanaan proyek tersebut harus dimulai, kapan harus diselesaikan dan bagaimana proyek tersebut akan dikerjakan, serta bagaimana penyediaan sumber dayanya. Pembuatan rencana pelaksanaan proyek mengacu pada kondisi dan perkiraan pada waktu rencana pelaksanaan itu dibuat, karena itu masalah akan timbul apabila tidak ada kesesuaian antara rencana yang telah dibuat dengan kenyataan yang sebenarnya. Masalah yang timbul akan menjadi suatu hambatan yang harus dihindari agar pelaksanaan proyek dapat berjalan dengan lancar. Pada dasarnya keberhasilan pelaksanaan proyek sangat tergantung pada sistem manajemen pengendalian dan pengawasan yang mendukung terlaksananya sasaran proyek tersebut.

Keterlambatan proyek bagi konsultan akan mengalami kerugian waktu dan biaya, karena keuntungan yang diharapkan oleh kontraktor akan berkurang, atau bahkan tidak mendapat keuntungan sama sekali. Bagi Owner, keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek akan menyebabkan kerugian terhadap waktu operasi hasil proyek, sehingga penggunaan hasil pekerjaan proyek menjadi mundur atau terlambat.

Pekerjaan penyusunan Revisi RTRW dilaksanakan secara kontraktual berdasarkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) yaitu selama 6 (enam) bulan

atau 180 (seratus delapan puluh) hari kalender dimulai dari keluarnya Surat Perintah Kerja (SPK), namun beberapa data ditemukan pelaksanaannya mengalami keterlambatan hampir mendekati 2 (dua) bulan lebih lambat dari *time schedule* yang sudah direncanakan di dalam KAK. Berdasarkan pengamatan keterlambatan dimaksud disebabkan beberapa faktor-faktor diantaranya kurangnya ketersediaan data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai sumber data sekunder sehingga pihak penyedia jasa menjadi kesulitan dalam mengumpulkan data.

Kurangnya penguasaan dan pemahaman tim penyusun/ konsultan terhadap Wilayah perencanaan, dikarenakan faktor tenaga Ahli yang berasal dari luar Provinsi Sumatera Barat dan faktor deliniasi Wilayah Perencanaan (WP) yang sangat luas secara batas administrasi sehingga waktu untuk *survey primer* melampaui waktu yang sudah di tentukan Pada *Time Schedule* pekerjaan penyusunan Revisi RTRW tersebut, informasi ini berdasarkan penyebaran kuisisioner dan wawancara lisan dengan pihak Tim Teknis dan *Stake Holder* kegiatan.

Wawancara lisan dan pengisian kuisisioner dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menyatakan kurangnya ketelitian tim penyusun dalam mengolah dan mengelaborasi data dan peta. Permasalahan tim teknis dari OPD tidak fokus kepada pekerjaan dikarenakan masih dibebani Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang melekat dari OPD asal masing masing anggota tim teknis yang tidak dapat di tinggalkan.

Adanya pergantian anggota tim teknis saat pekerjaan sedang berjalan karena imbas kebijakan Mutasi antar OPD oleh Kepala Daerah setempat sehingga terdapat indikasi beberapa anggota tim teknis pengganti yang ditugaskan dari OPD terkait kurang memahami muatan teknis pekerjaan. Permasalahan OPD asal tim teknis tidak menganggarkan Biaya Perjalanan Dinas Tim teknis terkait sehingga menjadi alasan ketidak hadiran anggota tim teknis terkait pada sesi pembahasan *Focus Group Discussion* (FGD).

Berdasarkan wawancara lisan dan penyebaran kuisisioner terhadap Tim Teknis dan Tim penyusun di dapat informasi Kurangnya keterlibatan, peran serta dan pemahaman Masyarakat dalam hal memberikan kontribusi masukan terkait

informasi Wilayah Perencanaan pada saat sesi Konsultasi Publik yang merupakan bagian dari amanat UU No.26 Tahun 2007 bahwa penyusunan RTRW berazaskan *Bottom Up* yang mana kegiatan ini melibatkan semua lapisan masyarakat dan berkolaborasi dengan pemerintah dimulai dari masyarakat, pemerintah desa, pemerintah kecamatan, pemerintah daerah, dan non pemerintahan seperti pihak swasta yang berada di dalam Wilayah Perencanaan juga dilibatkan dalam proses penyusunan RTRW Kabupaten ini. Faktor penghambat lainnya adalah disebabkan oleh terjadinya Perubahan Peraturan dan Regulasi terkait pedoman penyusunan RTRW Kabupaten/Kota. Dari permasalahan tersebut di atas, menyebabkan terjadinya keterlambatan pekerjaan pada pekerjaan penyusunan dokumen RTRW ini.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- a. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman
- b. Faktor yang paling dominan yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan penyusunan dokumen revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman
- c. Tindakan perbaikan dalam upaya mengantisipasi keterlambatan penyusunan revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman di masa yang akan datang

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi apa saja faktor-faktor penyebab keterlambatan penyelesaian penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Padang Pariaman
2. Menentukan peringkat (ranking) faktor-faktor dominan penyebab keterlambatan untuk kemudian menentukan faktor yang paling dominan dalam penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Padang Pariaman.

3. Sebagai pedoman bagi pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk mengantisipasi keterlambatan penyusunan revisi RTRW dimasa yang akan datang.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi peneliti sendiri diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman baru terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab keterlambatan Penyusunan revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagi pihak akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bisa dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terkait dengan pelaksanaan penyusunan revisi RTRW dimasa yang akan datang.
3. Sebagai referensi dan acuan bagi Penyedia Jasa/Konsultan Perencanaan Wilayah, pihak pengguna jasa dan seluruh *stake holder* yang terlibat dalam penyusunan dokumen dan agar lebih memahami dan mengetahui dengan jelas arah kebijakan pemanfaatan ruang di dalam penyusunan revisi RTRW di masa yang akan datang

1.4 Batasan Penelitian

Mengingat banyaknya tahapan dalam penyusunan RTRW mulai dari penyusunan Dokumen hingga sampai ke aspek legalisasinya terkait dengan topik penelitian ini, maka untuk mencapai tujuan penelitian agar tetap efektif dan efisien ditetapkan ruang lingkup dan batasan sebagai berikut :

1. Lokasi objek penelitian berada di Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Studi kasus penelitian ini dibatasi hanya pada proses penyusunan laporan awal, Fakta Analisa dan Laporan Akhir dokumen Teknis revisi RTRW Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 secara kontraktual saja dan tidak sampai kepada Pembahasan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), proses Persetujuan Substansi Kementrian ATR/BPN dan proses legalisasi Peraturan Daerah (PERDA).

3. Responden dalam penelitian ini adalah Penyedia Jasa dan *Stake Holder* yang terlibat di dalam pekerjaan penyusunan dokumen RTRW Kabupaten Padang Pariaman.
4. Fokus penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh faktor-faktor apa saja paling dominan yang menjadi penghambat pelaksanaan di dalam proses penyusunan dokumen revisi RTRW Tahun 2017.